BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:163) :

> "Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen."

Pengertian sistem pengendalian intern menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) adalah sebagai berikut :

"Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya".

Menurut V wiratna Sujarweni (2015:69) yaitu :

"Sistem Pengndalian Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang di buat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan"

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan dapat di simpulkan bahwa Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di

dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbart (2011:229) yang diterjemahkan Deny Arnos Kwaly dkk pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting yaitu:

1. "Pengendalian untuk pencegahan *(preventive control)* mencegah timbulnyasuatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena itu semua masalah mengenai pengendalian dapat di cegah.
2. Pengendalian untuk pemeriksaan *(detective control)* dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh untuk pengendalian pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.
3. Pengendalian korektif *(corrective control)* memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendali untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah,memperbaiki kesalahanatau kesulitan yang ditimbulkan dan mengubah sistemagar masalah di masa mendatang dapat diminimalisir atau dihilangkan"

Menurut Widjayanto Nugroho (2011: 168) :

"Pengendalian internal mempunyai dua fungsi utama yaitu: (1) Mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, (2) Mendorong efisiensi operasi organisasi sehingga kebijaksanaan ataupun tujuan yang telah digariskan dapat tercapai."

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan fungsi pengendalian intern adalah untuk pencegahan,pemeriksaan dan korektif untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan mendorong efisiensi organisasi.

2.1.1.3 Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:239), unsur pokok pengendalian intern dalam perusahaan adalah :

1. "Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka *(framework)* pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendaptan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat kedalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan *(reliability)* yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ditetapkan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempu oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :
    a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
    b. Pemeriksaan mendadak *(surprised audit)* Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
    c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.
    d. Perputaran jabatan *(job rotating)* Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan diantara karyawan dapat dihindari.

e. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayan tersebut.
f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lainnya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
   a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
   b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) :

"unsur-unsur pengendalian intern diturunkan dari cara manajemen menjalankan kegiatan organisasi dan merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen. Unsur-unsur ini saling terkait satu dengan lainnya.
Unsur- unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian internal yang memadai bagi organisasi melalui kepemimpinan, nilai bersama, dan budaya yang menekankan akuntabilitas untuk pengendalian.
2. Penilaian Risiko
   Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan penentuan langkah tindak yang tepat berkenaan dengan risiko tersebut.
3. Aktivitas-Aktivitas Pengendalian
   Aktivitas pengendalian adalah kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjalankan arahan-arahan manajemen, contohnya proses untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
4. Informasi dan Komunikasi
   Dalam suatu sistem pengendalian intern yang baik, informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam organisasi yang membutuhkannya dan dalam bentuk dan kerangka waktu yang membantu mereka melaksanakan pengendalian
5. Pemantauan
   Pemantauan pengendalian intern harus menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan memastikan bahwa temuan-temuan audit dan evaluasi lainnya diselesaikan dengan segera."

2.1.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:163) "Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.
   Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
   Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
3. Mendorong efesiensi.
   Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
   Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan"

Menurut Hery (2013:160) "tujuan pengendalian intern tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.

2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

2.1.1.5 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:223) :

"Struktur pengendalian intern mencakup lima komponen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinaan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi.
Kelima komponen tersebut adalah:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penetapan resiko manajemen
3. Aktifitas pengendalian dan pemantauan
4. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
5. Pemantauan"

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:196) :

"ada lima komponen pengendalian yaitu sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian Internal *(Control Environment)*
   Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan pondasi dari komponen lainnya. meliputi beberapa factor diantaranya :
   a. Integritas dan Etika
   b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
   c. Dewan Komisaris dan Komite audit
   d. Filosofi manajemen dan jenis operasi
   e. Struktur Organiasi
   f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment)*
   Terdiri dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakterister pengolahan sistem informasi. Sedangkan Analisis Risiko meliputi menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko.
   Adapun unsur-unsur penilaian risiko yaitu :
   a. Perubahan dalam lingkungan operasi
   b. Personel baru
   c. Sistem informasi yang baru atau yang di perbaiki
   d. Rekstrukturisasi korporasi

3. Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*
   Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua cara yaitu General controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak dan system development dan Application Controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization and validity dari proses transaksi.
4. Informasi dan Komunikasi *(Information and communication)*
   Sistem informasi yang relavan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntanbilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikann aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami bagaimana golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, bagaimana transaksi tersebut dimulai, pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.
5. Pemantauan *(Monitoring)*
   Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya.

2.1.1.6 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut V wiratna Sujarweni (2015:71) ada 5 komponen pengendalian intern, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan Pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik

2. Penaksiran Risiko
   Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian
   Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan
4. Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi
   Sistem informasi dan komunikasi terdiri atas metode-metode dan catatan-catatan yang diadakan untuk mencatat, memproses, meringkas dan melapor transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntanbilitas dan aktiva-aktiva,hutang-hutang terkait.
5. Pemantauan
   Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui jalannya sistem informasi akuntansi,sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang di harapkan dapat segera di ambil tindakan

2.1.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem informasi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:42) :

> "Sistem informasi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas entitas pemerintah daerah(kabupaten,kota, atau provinsi)."

Menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi (2013:52) :

> "Sistem Informasi Akuntansi adalah Komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan."

Menurut george H. Bodnar dan William S. Hopwood yang di terjemaahkan oleh Jusuf, A.A (2000:1) Sistem Akuntansi yaitu :

"Kumpulan sumber daya seperti : manusia dan peralatan,yang di atur untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi."

Dari Pengertian di atas dapat di simpulkan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk melakukan proses pengidetifikasi,pengukuran,pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah untuk memberikaan gambaran aktivitas di dalam perusahaan.

2.1.2.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2013:8) : "Akuntansi menyatakan fungsi sistem informasi akuntansi adalah :

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari
2. Mendukung proses pengambilan keputusan
3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal

Menurut Krismiaji (2010:5) fungsi sistem informasi akuntansi adalah :

> "untuk melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, aktivitas bisnis yang dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang digariskan, melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki perusahaan."

Dari pengertian di atas dapat di simpulkann bahwa fungsi Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang di laksanakan oleh organisasi,mengubah data menjadi organisasi dan menjaga asset organisasi.

2.1.2.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi daerah

Menurut Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart yang telah diterjemahkan Kikin Sakinah Nursafira dan Novita Puspari (2015:11) komponen-komponen sistem informasi dikelompokan sebagai berikut:

1. "Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA "

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:58) komponen Sistem Informasi Akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut : "

1. Perangkat Keras *(Hardware)*
2. Perangkat Lunak *(Software)*
3. Manusia *(Brainware)*
4. Prosedur *(Procedure)*
5. Basis data *(Database)*
6. Teknologi Jaringan komunikasi *(Communication Network Technology)"*

2.1.2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut James A Hall yang telah diterjemahkan Dewi Fitriasari Deny Arnos Kwary (2007:21) Tujuan Sostem Informasi Akuntansi adalah:

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen.
2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen.
3. Mendukung operasional harian perusahaan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2010:19) tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:"

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi."

2.1.2.5 Indikator Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut Bodnar (2000:700) menjabarkan beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:"

1.keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal acess dan kerusakan pada sistem.
2.waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem.Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
3.ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
4.variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5.relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan"

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2011:143) mengemukakan bahwa pengertian laporan keuangan:

"Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa :

> "Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya"

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuanga adalah

"Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan"

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah suatu hasil proses pengidentifikasian,pencatatan dan transaksi ekonomi untuk pegambilan keputusan oleh pihak lain yang handal dan dan dapat di bandingkan dengan periode yang lainnya.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012:26) :

"tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter".

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini(2009:14) Mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah :

"menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Dari pengertian di atas tujuan dan manpaat laporan keuangan menyediakan seluruh informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan tranfasansi laporan keuangan kepada publik.

2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2012:30) adapun beberapa pengguna yang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu:

a. Kreditur
b. Investor
c. Akuntan Publik
d. Karyawan Perusahaan
e. Karyawan perusahaan
f. Bapepam
g. Underwriter
h. Konsumen
i. Pemasok

j. Lembaga Penilai
k. Asosiasi perdagangan
l. Pengadilan
m. Akademis dan Peneliti
n. Pemda
o. Pemerintah pusat
p. Pemerintah asing
q. Organisasi Internasional"

2.1.3.4 Indikator Laporan Keuangan Daerah

Menurut Azhar Susanto (2008:13) dilihat dari kualitasnya maka secara umum informasi akuntansi memiliki empat dimensi kualitas informasi, yaitu:

1. Akurat, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan situasi dan kondisi yang ada.
2. Tepat waktu, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan.
3. Relevan, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
4. Lengkap, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang diinginkan dan dibutuhkan."

2.2. Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian internal adalah rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset yang ada di intansi atau lembaga pemerintah dalam menjaga dan merahasiakan informasi yang ada.Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan instansi yang lebih efektif pula.

Menurut Krismiaji (2010:218) :

"menyebutkan pengertian pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya."

Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika.Sistem informasi keuangan daerah memudahkan pihak yang lain untuk pengambilan keputusan.

Menurut Wing Wahyu (2006:19) yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah :

> "sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal (pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur, dan sebagainya)."

Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.Kualitas laporan keuangan yang baik dapat menyajikan laporan keuangan yang handal relevan dan dapat di bandngkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Munawir (2010:5) menyatakan bahwa :

”pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas.Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.”

2.2.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan

Menurut Romney dan Steinbart (2006 : 196) Berdasarkan COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) :

“sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan efisiensi operasi,Keandalan pelaporan keuangan dan Kepetuhan kerhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Mahmudi (2007: 11)

“Laporan keungan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus di lalui yang di atur dalam sistem akuntasi pemerintah daerah,sistem akuntasi di dalamnya mengatur sistem pengendalian intern,kualitas laporan keuangan sangat di pengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang di miliki pemerintah.”

Menurut Mulyadi (2010: 19) :

“mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.”

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh Sistem Pngendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keungan menurut Akhmad Syarifudin (2014) yang menyatakan :

"Dengan adanya penerapan Sistem Pengendalian Internal sangat membantu manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan"

Dan didukung penelitian oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti,Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) mengatakan :

"Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah."

Di dukung juga oleh penelitian Dyah dan Bestari (2015) mengatakan bahwa:

> "Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang di terapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta di patuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2.2.2. Pengarh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan

Menurut Ahmad (2008:428) :

> "Pemanfaatan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik,pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi".

Menurut Romney & Steinbar (2011) *Accounting Information System* (9 th edition) Diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary bahwa :

"Sistem informasi Akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan".

Penelitian terdahulu yang mengatakan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014) mengatakan :

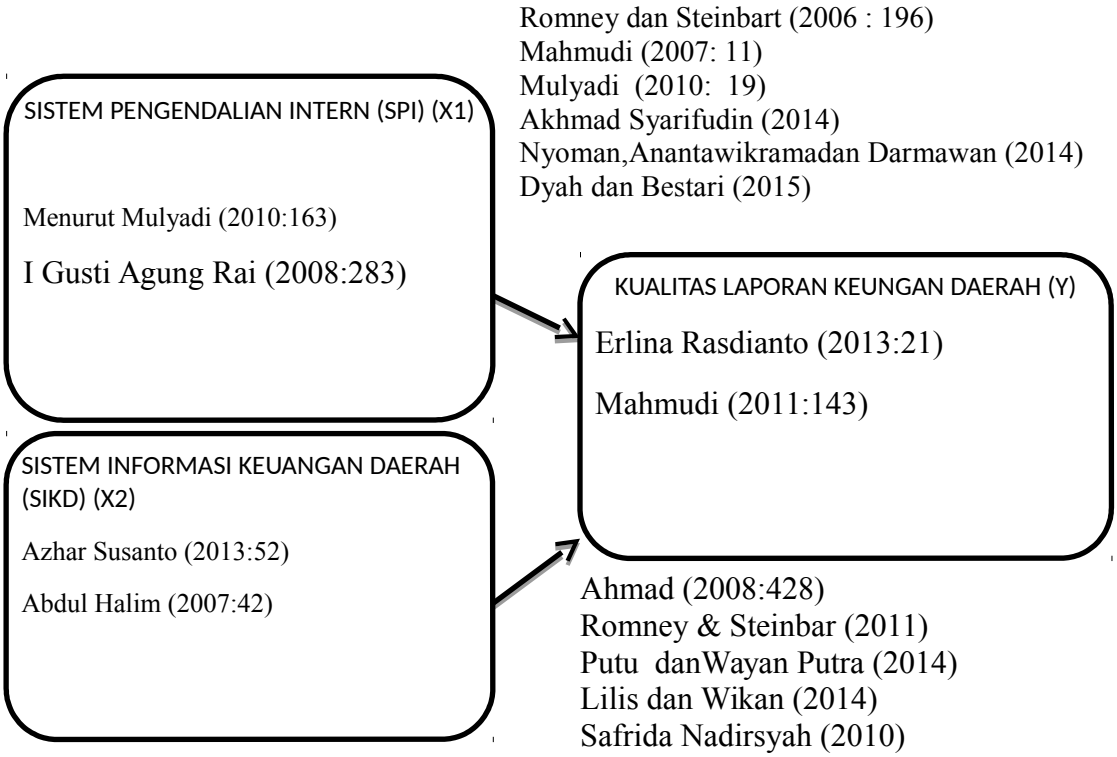
"Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan."

Di dukung juga oleh penelitian Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014) yang mengatakan :

> "Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya,dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu."

Safrida Yuliani,Nadirsyah dan Usman Bakar (2010) mengatakan :

> "Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan."



Gambar 2.1 Skema Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran.

Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan

standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah

H_2 : Sistem Informasi Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah.